

Dinamika Administrasi

Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen

Volume 2 Nomor 1. April 2019

Dinamika Administrasi ; Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen (DJAM) merupakan jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel orisinal mengenai ilmu pengetahuan, penelitian atau penelitian terapan dan perkembangan lainnya di bidang Ilmu Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, dan rumpun Keilmuan Manajemen. DJAM diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Oktober dan April). Target pembaca utamanya adalah peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi dan kalangan lainnya yang tertarik dengan isu Administrasi dan Manajemen

EDITOR IN CHIEF

Antonius Galih Prasetyo

(Lembaga Administrasi Negara)

EDITORIAL BOARD

Sarpan

(Universitas Wijaya Putera Surabaya)

Rangga Restu Prayogo

(Universitas Negeri Medan)

Alizar Isna

(Universitas Jenderal Soedirman)

Vincentia Ananda

(Unika Soegijapranata)

Ertien Rining Nawangsari

(UPN “Veteran” Jawa Timur)

David Laiyan

(Universitas Musamus Merauke)

Rima Ranintya Yusuf

(STIA LAN Jakarta)

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya, hingga bulan April 2019 ini Jurnal Dinamika Administrasi telah menerbitkan Volume 2. Nomor 1. Penerbitan Jurnal Dinamika Administrasi, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal Dinamika Administrasi.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal Dinamika Administrasi mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal Dinamika Administrasi akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Banyumas, April 2019

Tim Editor

DAFTAR ISI

Dinamika Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Volume 2 Nomor 1. April 2019

IMPLEMENTASI E-LEARNING SEBAGAI PENDUKUNG PROSES BELAJAR MENGAJAR BAGI DOSEN DAN MAHASISWA DI UPN “VETERAN” JAWA TIMUR Nuruni IK Wardani, Sishadiyati, dan Zumrotul Fitriyah	1
MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG KELUD MENGGUNAKAN METODE PARTICIPATION RURAL APPARSIAL (PRA) Dzakiyah A Hikmah, Johan Vivaldi A.S, Yuni Fatmawati, dan Sherina Aureliza	12
PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KARYAWAN MEKANIK AUTO 2000 WARU SURABAYA Faruk	27
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA Suryati Eko Putro	46
PENGARUH IKLIM KERJA DAN TRAINING TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO Miftahul Jannah	60
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA Aditama A Musaddad, Okta Y Rahayu, Erry Pratama, Supraptiningsih, dan Evi Wahyuni	73
DUKUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJAMEN (SIM) DALAM KEGIATAN MANAJEMEN Rifki Suwaji	94

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG KELUD MENGGUNAKAN METODE PARTICIPATION RURAL APPARSIAL (PRA)

**¹Dzakiyah A Hikmah, Johan Vivaldi A.S, Yuni Fatmawati, dan
Sherina Aureliza**

¹Program Studi Ilmu Admininstrasi Negara, UPN “Veteran” Jawa Timur

¹Jalan Raya Rungkut Madya, Surabaya, 60293

e-mail: dzakiyahadalah@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terdiri dari jajaran gunung berapi atau yang dikenal dengan sebutan “Ring of Fire”. Indonesia juga sebagai negara yang rawan terhadap bencana di dunia berdasarkan data gunung berapi di Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif dengan kurang lebih 5 juta penduduk yang berdiam di sekitarnya. Bencana yang ditimbulkan mengalami banyak kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan juga kehilangan nyawa. Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat tanggap darurat bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Namun pada kenyataannya masyarakat masih belum sepenuhnya mendapatkan pendistribusian bantuan yang sama antar sesama warga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik pemerintah maupun LSM dalam tanggap darurat bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara serta literature review. Fokus dalam penelitian ini adalah menunjukkan proses manajemen pemberdayaan masyarakat tanggap darurat bencana Gunung Kelud menggunakan metode Participation Rural Appraisal (PRA). Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan yaitu manajemen pemberdayaan masyarakat pada saat tanggap darurat bencana Gunung Kelud menggunakan metode Participation Rural Appraisal (PRA). Sehingga diharapkan pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik, baik dari instansi pemerintahan, LSM yang terlibat, maupun keterlibatan dari masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Tanggap Darurat, Metode PRA, Gunung Kelud.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Tanggap Darurat, Metode PRA, Gunung Kelud*

PENDAHULUAN

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian alamiah yang memiliki dampak besar yang mengakibatkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban penderitaan manusia serta dapat mengganggu tata kehidupan dan penghidupan manusia. Karena letak geografis Indonesia yang sedemikian rupa, juga merupakan negara yang rawan terjadi bencana. Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana alam. Bencana alam tersebut bermacam macam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kabupaten Kediri , Jawa Timur memiliki wisata alam yang menyajikan panorama kesejukan alam yang asri dan eksotis salah satunya tempat wisata Gunung kelud, objek wisata Gunung Kelud terletak di kawasan Desa Sugih Waras, Kecamatan Ngancar sekitar 40 km arah timur kota Kediri. Destinasi wisata alam Gunung Kelud tersebut banyak diminati bagi para wisatawan untuk menikmati pesona keindahan alamnya . Gunung kelud merupakan gunung berapi yang masih aktif berada di ketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut. Peristiwa letusan gunung Kelud yang terjadi pada Kamis ,13 Februari 2014 merupakan letusan yang terbesar disepanjang sejarah Gunung Kelud dan juga tercatat sebagai bencana nasional . Ketinggian lontaran material ke angkasa hingga radius 17 kilometer, hal tersebut menjadi bukti besarnya ledakan magma Gunung Kelud. Tidak hanya ledakan saja, lontaran pasir dan debu vulkanik yang menyebar hingga ke kawasan Jawa Barat , bahkan akibat tingginya intensitas debu sejumlah Bandar di Pulau Jawa terpaksa berhenti beroperasi. Perekonomian masyarakat, kesehatan, keamanan masyarakat juga menjadi terganggu. Bencana meletusnya Gunung kelud kemungkinan besar akan terulang lagi, maka dari itu perlu kesiapsiagaan masyarakat dan perlu manajemen bencana yang baik agar meminimalisir resiko atau dampak bencana. Menurut BAKORNAS PB (2007) dalam Winarni, Anam and Akhiruna, (2017) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pemba- ngunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Masyarakat kurang memahami tentang upaya pengurangan resiko bencana, hal tersebut tercermin kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan persepsi masyarakat yang menganggap bencana adalah takdir Tuhan. Dengan fenomena tersebut maka perlu adanya manajemen bencana untuk mengendalikan situasi bencana serta berhubungan dengan observasi, analisis dan pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Masyarakat kurang memahami tentang upaya pengurangan resiko bencana gunung api sehingga peran serta masyarakat perlu di teliti lebih lanjut. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang terselenggara secara sengaja untuk memfasilitasi masyarakat sekitar kawasan Gunung Kelud atau masyarakat lokal yang mempunyai resiko terdampak bencana dalam perencanaan, memutuskan dan mengelola sumberdaya local yang dimiliki di wilayah tersebut. Yang tercermin melalui aksi kebersamaan dan jaringan, Sehingga

nantinya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial.

Usaha untuk mengurangi kerentanan dan penguatan kapasitas masyarakat dikawasan Gunung Kelud untuk menghadapi bencana perlu ditingkatkan. Masyarakat sendiri juga perlu adanya pemberdayaan dalam tanggap darurat bencana. Dalam (Noor, 2016) menurut Chamber (1995) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable*. Lebih Pemberdayaan masyarakat diharapkan merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan 4 aspek yaitu perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal.

Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat dapat menyadari dan memahami kondisi geografis tempat mereka tinggal. Pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap yaitu :

1. Tahap penyadaran serta pembentukan perilaku peduli dan sadar sehingga masyarakat merasa membutuhkan peningkatan kesadaran yang tinggi.
2. Tahap transformasi kemampuan yaitu berupa wawasan pengetahuan, agar menjadi lebih terbuka wawasannya dan memberikan keterampilan dasar.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual

Untuk mengurangi dan menagani masalah banyaknya korban akibat bencana maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat bencana agar mengurangi resiko bencana seperti mencegah dan mengurangi ancaman mengurangi resiko atau mitigasi dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyikapi bencana terjadi masyarakat dalam penganggulangan bencana Gunung Kelud. Kewajiban kita dan negara ini membuat masyarakat yang rentan karena tinggal di kawasan rawan bencana menjadi lebih berkapasitas agar mereka mampu mengatasi resiko, sehingga ancaman tidak menjadi bencana. (ET Paripurno, 2008)

Dengan demikian Berdasarkan fenomena di atas, untuk mengetahui manajemen pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat bencana, maka peneliti tertarik untuk melakukan tentang manajemen pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat bencana Gunung Kelud.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan . Makna pemberdayaan ini adalah suatu proses dari memberikan kekuatan dari pihak yang belum berdaya atau belum mempunyai kekuatan dari pihak yang sudah berdaya ke belum yang berdaya. Dalam Iriani Margayaningsih, (2016) Robbins (Chatterjee, & Canda, 1998) secara singkat menyatakannya sebagai berikut : *“Empowerment- “process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals”*.

Sedangkan menurut Mulyawan (2016) dalam Suparjan & Suyatno (2003) menyatakan bahwa model pembangunan alternatif pada hakekatnya memandang bahwa terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan bukan disebabkan oleh masyarakat bodoh dan tidak memiliki kemampuan, akan tetapi ketidakberdayaan terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan.

Pemberdayaan memiliki makna pengembalian daya atau membangkitkan sumber daya arti lain dalam Noor (2016) pemberdayaan itu sendiri adalah pemberdayaan proses pemberian kesempatan seseorang kepada orang lain untuk lebih ke berfikir , bertindak dengan sesuai keputusannya sendiri terkait dengan apa yang menjadi pembahasan. Lord and Hutchison (1993) mengutip While Whitmore (1988) yang berpendapat bahwa *feels the concept of empowerment needs to be more clearly defined, she states that there are some common underlying assumptions: a) Individuals are assumed to understand their own needs better than anyone else and therefore should have the power both to define and act upon them. b) All people possess strengths upon which they can build. c) empowerment is a lifelong endeavor. d) personal knowledge and experience are valid and useful in coping effectively.*

Menurut Wrihatnolo & Nugroho dalam Widayanti (2012) konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan

sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Pemberdayaan ini haruslah dilakukan secara terarah dan jelas agar juga menentukan hasil yang sebaik baiknya pemberdayaan haruslah mengikutsertakan masyarakat yang berpartisipasi sekaligus agar meningkatkan kemampuan masyarakat, melaksanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan ini paling efektif dan efisiensi jika melakukan secara bersamaan atau memandirikan masyarakat atau proses penguatan individu kepada masyarakat agar komunitasnya lebih terarah serta membukakan akses peluang kepada masyarakat agar lebih percaya diri.

Dari sisi tujuan, pemberdayaan adalah meningkatkan kualitas masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan atau masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau kemampuan pengetahuan untuk berpartisipasi berinteraksi sosial kepada masyarakat yang lain dalam kemampuan fisik maupun ekonomi yang ada dalam melaksanakan kehidupan sosial dalam kehidupannya . dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan masyarakat agar lebih mampu untuk kehidupan yang lebih baik lagi seperti agar perbaikan perbaikan lingkungan yang diharapkan dapat memperbaiki lingkungan sosial kehidupan dan fisik karena kerusakan lingkungan sendiri sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan psikologis manusia yang disebabkan oleh kemiskinan kebutuhan dasar itu mencukupi kehidupan yang layak , sandang pangan yang memenuhi , pakaian . kenakalan remaja , lingkungan yang sangat tidak kondusif tetapi lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan sangatlah diperlukan seperti orang tua dan guru lebih menjaga agar tidak terjadi lingkungan yang merusak dapat memasuki ke diri kita sendiri dan pengarahan lingkungan internal sendiri. perbaikan masyarakat perbaikan masyarakat yang didukung oleh lingkungan sosial yang lebih baik dan terarah akan menghasilkan yang baik juga akan terjadi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik baik pula dan kondusif terarah dan efektif agar tercapai mandirinya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran , kemauan , kemajuan agar masyarakat hidup lebih baik lagi dengan kondisi lingkungan yang mendukung sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi

Kemandirian masyarakat sendiri adalah merupakan suatu kondisi yang sering dialami masyarakat untuk melakukan pikiran , memutuskan serta melakukan sesuatu yang tepat dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah – masalah yang di hadapi dengan menggunakan daya dan kemampuan kognitif , konatif , psikomotorik , dengan

pengarahan lingkungan internal yang dimiliki masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya ditunjukkan untuk masyarakat yang melakukan pemberdayaan sendiri masyarakat yang mandiri yang menyangkut kehidupan masyarakat itu sendiri dengan adanya pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu berlaku mandiri karena pemberdayaan harus memiliki kepercayaan agar menuju ke sebuah arah yang jelas dan efisiensinya terjaga.

Diharapkan pemerintah juga ikut melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakatnya agar lebih dapat melakukan kegiatan yang positif lagi masyarakatnya pun harus mendukung atau berpartisipasi dalam yang sudah di upayakan oleh pemerintah Indonesia ini dalam mencakup masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah haruslah segera mencari solusi masalah di atas seperti ekonomi yang terjadi di Indonesia ini yang sangat banyak adalah kemiskinan upaya pemerintah haruslah mencari akar dari permasalahan ini, masalah upaya pemberdayaan ini masyarakat ini juga harus didukung oleh masyarakat juga harus mempunyai daya memberikan pemikirannya yang bagaimana pemerintah sudah melakukan kerja atau pelayanan kepada masyarakat ini. Dalam hal ini pemberdayaan itu diperlukan dalam tanggap darurat bencana gung kelud.

Sedangkan tahapan dalam pemberdayaan menurut Wrihatno dan Dwijowijoto (2007) dalam Bancin (2011) dijelaskan bahwa pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan” yang pertama adalah : 1. kesadaran : memberi pemahaman kepada masyarakat miskin bahwa mereka mempunyai hak untuk hidup yang lebih baik. 2. meningkatkan kapasitas kemampuan : memberi kemampuan untuk mengelola kehidupannya. 3. Pendayaan : memberi peluang kepada masyarakat miskin yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Pendapat lain dari Sumodiningrat (2002) yang melihat adanya upaya pemberdayaan dilihat dari tiga sisi: 1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) dalam arti setiap masyarakat pasti mempunyai potensinya masing-masing untuk dikembangkan lagi. 2. potensi yang memperkuat yang dimiliki masyarakat (empowering) dalam arti partisipasi masyarakat harus ditingkatkan lagi dalam pengambilan keputusan. 3. memberdayakan atau melindungi dalam arti masyarakat haruslah melindungi dirinya tau kelompoknya atau memandirikan masyarakat dalam kehidupan dengan lebih baik lagi (Purbathin Hadi, 2015).

Pemberdayaan sebagai proses adalah suatu upaya yang sudah dilakukan dalam masyarakat pemberdayaan untuk mengembangkan ke tahap suatu rencana yang lebih baik lagi ke pemberdayaan selanjutnya yang lebih baik .pemberdayaan haruslah sesuai dengan apa yang di dapat masyarakat dari formal maupun non formal . proses pemberdayaan masyarakat dalam Hadiyanti (2008) Tahap ini terdiri dari kegiatan : a. kajian keadaan pedesaan partisipatif, b. pengembangan kelompok, c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta d. monitoring dan evaluasi partisipati

Strategi pemberdayaan untuk tercapainya suatu strategi haruslah ada strategi yang akan dicapai , maksud dari strategi sendiri adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan , untuk itu perlu adanya strategi agar tercapainya suatu usaha pemberdayaan masyarakat yang akan kita lakukan. Dalam Cholisin(2011) ada beberapa strategi yang dapat di terapkan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi : 1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. 2. Meberdaya atau melindungi. 3. Memperkuat potensi masyarakat.

Manajemen Tanggap Darurat Bencana

Arti dari bencana sendiri ialah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang berupa banjir , gempa bumi , tsunamii , dll yang dapat mengganggu atau mengancam psikologis dapat kehilangan harta benda , merusak lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam . Sedangkan manajemen tanggap darurat ialah seluruh kegiatan yang menangani fungsi pada saat kejadian bencana terjadi maupun pasca pemulihan sarana dan prasarana bencana Dengan adanya Manajemen tanggap darurat maka dari itu diperlukan strategi *Command* (komando) , *control* (pengendalian) , *Coordination* (koordinasi) dengan adanya ini maka tim evakuasi agar lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya dan hasilnya pun akan baik dan persiapan sempurna , karena dengan adanya keadaan darurat jika masyarakat tidak bantu maka jiwa masyarakat akan ikut terancam.

Seperti yang terjadi di Gunung kelud , kediri pada tahun 2014 , gunung kelud merupakan gunung yang termasuk aktif di Indonesia dan sudah meletus berulang kalinya yang terakhir meletus yaitu pada tahun 2014 dan memakan banyak korban jiwa kemudian mengeluarkan abu vulkanik akhirnya mengakibatkan sarana yang rusak , hilangnya kapasitas air bersih dan lahan pertanian yang rusak mengakibatkan kehilangan sumber mata pencarian Syiko, Rachmawati dan Rachmansyah (2014) dan mengeluarkan hujan

abu yang sampai pada beberapa kota . Dan juga harus ada rehabilitasi yaitu suatu kegiatan proses sebelumnya yang mengalami mengganggu fisik , kondisi sosial yang akan di kelola lagi dengan baik agar tidak terjadi lagi BNPB (2008).

Dalam hal ini , upaya pemerintah dalam tanggap darurat bencana ialah memberikan penanganan yang seharusnya seperti: evakuasi korban yang masih selamat maupun tidak; memberikan jatah sandang pangan yang layak seperti makanan , minuman instan , pakaian , sepatu , susu; penyediaan air bersih di sekitar , untuk itu diperlukan membersihkan diri , mencuci pakaian ataupun cuci piring maka itu diperlukan sistem pengelolaan yang baik; pemerintah memberikan layanan medis , kesehatan , obat-obatan untuk warga setempat kegiatan ini yang tentunya dilakukan oleh dinas kesehatan; membantu dengan mengganti rugi biaya yang terkena dampak bencana; menyediakan tempat tinggal sementara , seperti memanfaatkan lahan kosong atau lapangan dengan adanya tenda; dan memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang “Manajemen Pemberdayaan dalam Tanggap Darurat Bencana Gunung Kelud Menggunakan Metode Participation Rural Appraisal (PRA)”. A. Muri Yusuf (2014) Penelitian kualitatif ini merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu menggunakan Literature Review yang terdiri dari 12 jurnal nasional, 3 jurnal internasional dan 2 buku. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah proses manajemen pemberdayaan masyarakat tanggap darurat bencana Gunung Kelud menggunakan Model Pemberdayaan Participation Rural Appraisal (PRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 (2008) Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana Gunung Kelud masyarakat di kawasan Gunung Kelud masih permisif yang menganggap bahwa bencana alam merupakan takdir Tuhan. Hal tersebut membuat kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana masih rendah. Tentunya pengetahuan akan bencana alam banyak yang mengetahui karena dari lembaga pemerintah yang melakukan sosialisasi di kawasan rawan bencana, akan tetapi untuk tingkat kerentanan sendiri masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari kerusakan pemukiman akibat erupsi Gunung Kelud yang mencapai total kerugian yang cukup besar.

Adapun juga sikap masyarakat yang kurang tanggap terhadap adanya bencana erupsi Gunung Kelud. Yang pada saat itu sudah ada tanda-tanda dari erupsi Gunung Kelud, akan tetapi masyarakat sangat sulit di evakuasi walaupun pada saat itu sudah adanya peringatan dan hal ini lah yang menjadikan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana alam masih tinggi. Kemudian dalam keadaan pemulihan warga setelah evakuasi yaitu masyarakat dikembalikan ke rumah masing-masing warga bergotong royong membersihkan rumah-rumah, jalan raya yang tertutup pasir.

Menurut Cavestro (2003) Participatory Rural Appraisal (PRA) is considered one of the popular and effective approaches to gather information in rural areas. This approach was developed in early 1990s with considerable shift in paradigm from top-down to bottom-up approach, and from blueprint to the learning process. In fact, it is a shift from extractive survey questionnaires to experience sharing by local people. PRA is based on village experiences where communities effectively manage their natural resources.

Dari pengertian diatas dapat diartikan Participatory Rural Appraisal (PRA) dianggap sebagai salah satu pendekatan yang populer dan efektif untuk mengumpulkan informasi di daerah pedesaan. Pendekatan ini dikembangkan pada awal 1990-an dengan pergeseran paradigma dari pendekatan top-down ke bawah, dan dari cetak biru ke proses pembelajaran. Bahkan, ini adalah pergeseran dari kuesioner survei ekstraktif ke berbagi pengalaman oleh masyarakat setempat. PRA didasarkan pada pengalaman desa di mana masyarakat secara efektif mengelola sumber daya alam mereka

Metode pendekatan ini dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai

peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigm pembangunan yang berpusat pada rakyat (People Centry Development). Jadi titik tekan pelaksanaan PRA adalah keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan dan peningkatan kemandirian dan kekuatan internal

Terdapat lima kunci utama desain penelitian untuk mengimplementasikan Participatory Rural Apprasial (PRA) Menurut Syahyuti (2006) dalam Masrukin, Toto Sugito, Bambang Suswanto, (2013) yaitu: 1. Participation. 2. Teamwork. 3. Fleksibilitas. 4. Optimal ignorance. 5. Systematic. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Participation yaitu partisipasi masyarakat karena metode ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat setempat terlibat, tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi sebagai mitra dengan tim PRA dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan tanggap darurat bencana Gunung Kelud yaitu :

- a. Pra Erupsi Gunung Kelud, yaitu tindakan yang penting dalam mengantisipasi dampak pada saat bencana terjadi terdiri dari kajian cepat yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan BPBD dibuat dengan terlibatnya masyarakat dan LSM dalam kajian secara cepat terhadap penentuan status keadaan tanggap darurat Gunung Kelud dan proses evakuasi masyarakat radius 5 km sekitar Gunung Kelud untuk di Evakuasi sehingga permasalahan evakuasi yang dilakukan oleh tim tidak berangsur-angsur lama dengan warga. Status Keadaan Darurat yaitu saat penetapan status keadaan darurat Gunung Kelud pemerintah daerah juga BPBD melakukan pengumuman kepada warga – warga setempat untuk persiapan evakuasi ke zona yang aman.

- b. Saat Bencana, Penyelamatan dan Evakuasi yaitu penyelamatan dan evakuasi warga dengan menggunakan truk – truk untuk dievakuasi ke daerah yang lebih aman, saat evakuasi ini BPBD setempat dapat memberdayakan masyarakat yang mempunyai kendaraan truk maupun mobil untuk membawa warga ke tempat pengungsian. Pemenuhan Kebutuhan Dasar yaitu saat berada di pengungsian warga mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang layak huni. Ketika

pengungsian dapat melibatkan masyarakat dalam proses memasak makanan, penyiapan makanan untuk korban bencana. Warga juga memperoleh perlindungan baik perlindungan kesehatan dan kemananan.

- c. Pasca Bencana, yaitu tindakan yang penting dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dampak terjadinya bencana dimana diperlukan motivasi, pendampingan, pemulihan masyarakat ketika kembali kerumah, masyarakat yang kembali kerumah berkerja sama untuk membersihkan genting – genting rumah dan jalanan dari pasir yang menutupi, merawat ternak yang dimiliki, masyarakat meperoleh ganti rugi genting yang rusak akibat hujan pasir, subsidi makanan dan bantuan baju yang layak serta pendampingan untuk pemulihan kondisi psikis. Pemulihan ini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
2. Teamwork, yaitu secara umum PRA paling baik dilakukan oleh tim lokal dengan beberapa orang luar hadir, perwakilan perempuan yang signifikan, dan campuran spesialis sektor dan ilmuwan sosial dan topik serta lokasi pekerjaan. Pada pengaturan teknisnya penanganan tanggap darurat bencana dilakukan berdasarkan pedoman komando tanggap darurat bencana. Pedoman yang dimaksudkan yaitu sebagai panduan BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana juga bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, akuntabel, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Fleksibilitas yaitu kombinasi teknik yang sesuai dalam konteks pengembangan tertentu akan ditentukan oleh variabel-variabel seperti ukuran dan campuran keterampilan tim PRA, waktu dan sumber daya yang tersedia, serta topik dan lokasi pekerjaan. Dalam hal pedoman komando tanggap darurat bencana berisi yaitu : a. Tahap pembentukan komando tanggap darurat, b. Organisasi dan tata kerja komando tanggap darurat, c. Pola penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana, d. Evaluasi dan pelaporan. Dalam penyusunan tersebut

BNPB/BPBD harus bisa menyesuaikan dan bertindak dengan cepat dan fliksibel sehingga penanganan masyarakat segera.

4. Optimal ignorance yaitu agar efisien dalam hal waktu dan uang, pekerjaan PRA bermaksud mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat rekomendasi dan keputusan yang diperlukan. Dalam pembentukan komando tanggap darurat bencana dilakukan : A. Informasi kejadian awal bencana yang diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media masa, laporan instansi terkait, masyarakat, informasi lain yang dapat dipercaya. B. Penugasan tim reaksi cepat, dari informasi kejadian awal yang diperoleh BNPB/BPBD menugaskan pengkajian secara cepat, tepat dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan kepada msyarakat. C. Penetapan status/tingkat bencana, dalam hal ini dapat dilakukan oleh bupati /walikota untuk menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota, lalu gubener untuk menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi, lalu Presiden untuk menetapkan status/tingkat bencana skala nasional. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut maka kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menunjuka seorang pejabat sebagai komando penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional/daerah. D. Pembentukan Komando tanggap darurat bencana, dengan kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuai status tingkat bencana dan tingkat kewenangannya dengan mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana, melaksanakan mobilisasisumber daya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi lembaga terkait dan/atau masyarakat.
5. Systematic yaitu data yang dihasilkan PRA jarang kondusif untuk analisis statistik (mengingat sifatnya yang sebagian besar kualitatif dan ukuran sampel yang relatif kecil), cara-cara alternatif telah dikembangkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Ini termasuk pengambilan sampel berdasarkan perkiraan stratifikasi komunitas berdasarkan lokasi geografis atau kekayaan relatif, dan pemeriksaan silang, yang menggunakan sejumlah teknik untuk menyelidiki pandangan tentang satu topik (termasuk melalui pertemuan komunitas akhir untuk membahas temuan dan memperbaiki ketidak konsistenan). Dalam pelaksanaan

yang efektif dan efisien diperlukan pelaksanaan yang systemtic dan berkelanjutan dan bersifat cepat dari BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dapat tercapai sesuai dengan ketentuan.

Dari model diatas diperlukan koordinasi untuk terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. Sehingga diharapkan pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik, baik dari instansi pemerintahan, LSM yang terlibat, maupun keterlibatan dari masyarakat. Adapun susunan kelembagaan yang khusus menanggulangi bencana dalam hal ini pemerintah kabupaten Kediri baru membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Februari 2015 tepatnya setahun pasca terjadinya erupsi gunung Kelud. Sehingga dalam hal ini penanggulangan Bencana bukan hanya tugas pihak BPBD yang bertanggung jawab, namun masyarakat dan stakeholders juga memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam menangani dampak timbulnya bencana.

Dari paparan Model pemberdayaan Participation Rural Apparsial (PRA) diatas untuk meningkatkan penyamarataan distribusi pada warga bencana Gunung Kelud perlu adanya pegelolaan sumber bantuan baik berbentuk dana maupun kebutuhan sandang, papan dan pangan dibentuklah sebuah tim dalam BPBD untuk menghimpun bantuan tersebut. Dana yang diperoleh untuk bencana dapat bersumber dari dana dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus, dana dari pemerintah daerah, dana yang terkumpul dari masyarakat luar daerah atau LSM kemudian dengan dibentuknya sebuah tim tersebut untuk menghimpun dana tersebut tentunya dalam hal pendistribusiannya akan merata kepada masyarakat korban bencana gunung kelud.

KESIMPULAN

Negara Indonesia menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Bahkan juga menyimpan suatu keindahan alam yang dapat menjadikan alam tersebut menjadi destinasi wisata. Dari kekayaan dan keindahan alam tersebut terdapat suatu bencana yang dapat melanda negara Indonesia. Bencana alam tersebut bermacam macam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan masih banyak lagi. Kabupaten

kediri sebagai salah satu daerah yang memiliki keindahan alam dan juga memiliki potensi bencana alam salah satunya yaitu Gunung Kelud. Adanya potensi bencana alam membuat pemerintah kabupaten Kediri melakukan pemberdayaan masyarakat dalam proses tanggap darurat bencana. Dalam proses pemberdayaan masyarakat ada 3 tahap yang dilakukan mulai dari tahap penyadaran perilaku, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan intelektual. Setidaknya melalui pendekatan PRA akan dapat membantu proses manajemen bencana yang lebih efektif, cepat dan dapat mengurangi resiko bencana. Terdapat lima kunci utama implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu: 1. Participation. 2. Teamwork. 3. Fleksibilitas. 4. Optimal ignorance. 5. Systematic

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf (2014) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bancin, M. H. (2011) 'Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat)', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 22(3), pp. 179–194
- BNPB (2008) 'Perka Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana', pp. 5–12
- Cavestro, L. (2003). PRA-participatory rural appraisal concepts methodologies and techniques. *Padova University. Padova PD. Italia.*
- Cholisin (2011) *Pemberdayaan Masyarakat*, Artikel (Online) <http://staff.uny.ac.id>
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keterampilan Produktif di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90-99.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Lord, J., & Hutchison, P. (2009). The process of empowerment: Implications for theory and practice. *Canadian Journal of Community Mental Health*, 12(1), 5-22.
- Margayaningsih, D. I. (2016). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *Jurnal PUBLICIANA*, 9(1), 158-190.
- Masrukin, Toto Sugito, Bambang Suswanto, A. S. (2013) 'MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA', *Jurnal Komunitas*, 3(1), pp. 92–102.
- Mulyawan, R. (2016) *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. cetakan I. Edited by W. Gunawan. Bandung: UNPAD PRESS
- Noor, M. (2016) 'Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah*, 2(2), pp. 180–189.
- Syiko, S. F., Rachmawati, T. A., & Rachmansyah, A. (2014). Analisis Resiko Bencana Sebelum dan Setelah Letusan Gunung Kelud Tahun 2014 (Studi kasus di Kecamatan Ngantang, Malang). *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(2).

- Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Winarni, S., Anam, A. K. and Akhiruna, R. A. (2017) 'Disaster Risk Reduction (Mitigation) Eruption of Kelud Mountain by the Society In The Area Of Disaster-Prone Areas (KRB) III Blitar Regency', *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 3(3), pp. 272–277. doi: 10.26699/jnk.v3i3.art.p272-277